

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN AUDIT
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

WILDAN ANDIKA SYAIFULLAH
NIM. 112221083

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2016**

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN AUDIT
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

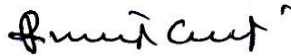
Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

WILDAN ANDIKA SYAIFULAH
NIM. 11.22.2.1.083

Surakarta, 8 November 2016

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



RAHMAWAN ARIFIN, S.E., M.Si.
NIP: 19740302 200003 2 003

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN AUDIT
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

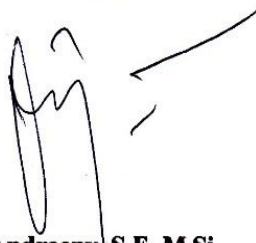
Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

WILDAN ANDIKA SYAIFULAH
NIM. 11.22.2.1.083

Surakarta, 8 November 2016

Disetujui dan disahkan Oleh:
Biro Skripsi



Dita Andraeny, S.E, M.Si.,
NIP: 19880628 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : WILDAN ANDIKA SYAIFULLAH
NIM : 11.22.2.1.083
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL dan AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Empiris Pada Badan Dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 November 2016



Wildan Andika Syaifullah

Rahmawan Arifin S.E.,M.Si.,
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdra : Wildan Andika Syaifullah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wildan Andika Syaifullah, NIM : 11.22.2.1.083 yang berjudul:

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 September 2016
Dosen Pembimbing



Rahmawan Arifin, S.E.,M.Si.,
NIP: 19740302 200003 2 003

PENGESAHAN

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN AUDIT
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)**

Oleh :

WILDAN ANDIKA SYAIFULLAH
NIM : 11.22.2.1.083

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2016/ 17 Muharram 1438 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dosen Penguji :

1. Meika Riba'ati, SE, M.Si
NIP 19680505 200801 2 008
2. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si
NIP 19841008 201403 2 001
3. Imanda Firmantyas Putri, SE, M.Si
NIP 19850327 201403 2 003



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Drs. H. Sri Waluyo, MM., Ph. D
NIP. 1952061011 198303 1 002

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang telah ada
pada diri mereka sendiri”

(Q. S. Ar-Ra'd :11)

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap”.

(QS: Al-Insyirah ayat 6-8)

“Selama ada keyakinan, kesempatan akan selalu ada”

(Penulis)

“Jangan terlalu lama mengukur masalah, Segeralah membangun langkah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil 'Alamin.

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya ku yang sederhana ini untuk:

Ayahanda Wasuri, Ibunda Sri Wahyuni, Adikku Windita Roselawati,

Teman-temanku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2011,

Serta Almamaterku IAIN Surakarta

Yang selalu memberikan doa, semangat, keceriaan dan kasih sayang

yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terimakasih...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Persiapan, perancangan dan pelaksanaan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti. Banyak kesulitan dan hambatan yang harus dilalui. Tetapi berkat arahan, bantuan dari berbagai pihak maka akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, peneliti dengan setulus hati menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada :

1. Dr. H Mudhofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
3. Marita Kusuma Wardani, S.E.,M.Si.,Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Helmi Haris, S.H.I.,M.Si, Wali Studi Penulis Selama Belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. M.Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Anim Rahmayati S.E.I., M.Si., yang turut memberikan masukan dan saran dalam penelitian.
7. Dita Andreany, S.E, M.Si, Biro Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah.
8. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Akuntansi Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah berpartisipasi dalam penelitian.
10. Keluarga (Bapak, Ibu dan Adikku), terimakasih atas doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tiada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah ku lupakan.
11. Sahabat Penulis Muhammad Khasim, Prashinto Fredholin Sunandito, Rizky Yuniar Rahmadieni, Sholikin, Sulistyو Rahmawati serta teman-temanku Jurusan Akuntansi Syariah, Manajemen Syariah dan Perbankan Syariah khususnya angkatan 2011 yang tak henti-hentinya memberikan semangat, keceriaan dan doa kepada penulis sampai terselesaikannya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T, begitu pula dengan skripsi ini yang pasti memerlukan saran, kritik dan perbaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 27 September 2016

Peneliti

ABSTRACT

The aims of this research are to know the influence of the financial statements presentation, financial report accessibility, functional supervision and performance audit toward public accountability and find out which are the most dominant variables affecting public accountability of SKPD Sukoharjo.

The samples are 49 respondents and methods used is purposive sampling. The data was collected by distributing questionnaires to heads of department and chief financial officer in 25 departments joined in SKPD sukoharjo. The analysis used is multiple linear regression. The result of this research is to show that adjusted R² of 0,765 indicate that 76,5% public accountabillity can be variable independent in this research.

Hypothesis testing by simultaneously show there are significant correlation between the financial statements presentation, financial report accessibility, functional supervision and performance audit toward public accountability is 0,000. Hypothesis testing by partial shows there are signification correlation between financial statements presentation is 0,000; financial report accessibility is 0,033; functional supervision is 0,000 and performance audit is 0,022 toward the public accountabillity.

Key words: public accountability, financial statements presentation, financial report accessibility, functional supervision, and performance audit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dan mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi akuntabilitas publik pada SKPD Sukoharjo.

Sampel yang digunakan sebanyak 49 responden dan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada kepala dinas dan kepala bagian keuangan di 25 dinas yang tergabung dalam SKPD Sukoharjo. Alat analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,765 menjelaskan bahwa 76,5% akuntabilitas publik dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini.

Uji secara simultan menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar 0,000. Uji parsial menunjukkan hubungan signifikan antara variabel penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas publik sebesar 0,000; variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,033; variabel pengawasan fungsional sebesar 0,000 dan variabel audit kinerja sebesar 0,022 terhadap variabel akuntabilitas publik.

Kata kunci: akuntabilitas publik, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional, audit kinerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10

1.7	Jadwal Penelitian.....	11
1.8	Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....		13
2.1	Tinjauan Pustaka	13
2.1.1	Akuntabilitas Publik.....	13
1.	Definisi Akuntabilitas Publik.....	13
2.	Jenis dan Dimensi Akuntabilitas Publik	14
3.	Landasan Akuntabilitas Menurut Islam.....	15
2.1.2	Penyajian Laporan Keuangan	16
1.	Definisi Penyajian Laporan Keuangan	16
2.	Standar Penyajian Laporan Keuangan.....	16
3.	Hubungan Variabel Penyajian Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik	18
2.1.3	Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	20
1.	Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan	20
2.	Standar Aksesibilitas Laporan Keuangan	20
3.	Hubungan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik	20
2.1.4	Pengawasan Fungsional.....	23
1.	Definisi Pengawasan.....	23
2.	Jenis-Jenis Pengawasan	24
3.	Definisi Pengawasan Fungsional	26

4. Hubungan Variabel Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik	27
2.1.5 Audit Kinerja	28
1. Definisi Audit	28
2. Jenis-Jenis Audit Sektor Publik.....	29
3. Definisi Kinerja.....	30
4. Definisi Audit Kinerja	31
5. Indikator Dalam Melakukan Audit Kinerja.....	31
6. Hubungan Variabel Audit Kinerja Dengan Akuntabilitas Publik.....	33
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	34
2.3 Kerangka Berpikir	36
2.4 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	41
3.3.1 Populasi.....	41
3.3.2 Sampel.....	43
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	43
3.4 Data dan Sumber Data.....	43
3.4.1 Data	43
3.4.2 Sumber Data.....	44

3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Variabel Penelitian	46
3.7	Definisi Operasional Variabel	46
3.7.1	Variabel Dependen	47
3.7.2	Variabel Independen	48
3.8	Instrumen Penelitian	50
3.9	Teknik Analisis Data	51
3.9.1	Uji Instrumen Penelitian	51
1.	Uji Validitas	51
2.	Uji Reliabilitas	52
3.9.2	Uji Asumsi Klasik	52
1.	Uji Normalitas	53
2.	Uji Multikolinieritas	54
3.	Uji Heteroskedastisitas	54
3.9.3	Uji Hipotesis	55
1.	Uji Koefisien Determinasi	56
2.	Uji F	57
3.	Uji t	57
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Penelitian	58
4.1.1	Kondisi Geografis	58
4.1.2	Pengumpulan Data	59
4.1.3	Profil Responden	60

4.2	Hasil uji Instrumen Penelitian	62
4.2.1	Uji Validitas	62
4.2.2	Uji Reliabilitas	65
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	66
4.3.1	Uji Normalitas.....	66
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	67
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	68
4.4	Hasil Uji Hipotesis	70
4.4.1	Uji F	70
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi	71
4.4.3	Uji t	72
4.4.4	Koefisien Regresi Berganda.....	74
4.5	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	76
BAB V PENUTUP.....		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Keterbatasan Penelitian	85
5.3	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Yang Relevan	34
Tabel 3.1	: Daftar Populasi Penelitian.....	42
Tabel 3.2	: Definisi Operasional Variabel X.....	49
Tabel 4.1	: Distribusi Kuesioner.....	59
Tabel 4.2	: Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3	: Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel 4.4	: Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
Tabel 4.5	: Validitas Instrumen Akuntabilitas Publik... ..	62
Tabel 4.6	: Validitas Instrumen Penyajian Laporan Keuangan.....	63
Tabel 4.7	: Validitas Instrumen Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	63
Tabel 4.8	: Validitas Instrumen Pengawasan Fungsional.....	64
Tabel 4.9	: Validitas Instrumen Audit Kinerja	64
Tabel 4.10	: Uji Reliabilitas	65
Tabel 4.11	: Uji Kolmogorov-Smirnov.....	67
Tabel 4.12	: Multikolinieritas	68
Tabel 4.13	: Uji Glejser.....	70
Tabel 4.14	: Uji Ketepatan Model (F).....	71
Tabel 4.15	: Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4.16	: Uji t.....	72
Tabel 4.17	: Uji Regresi Berganda.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4.1 : Grafik Uji Normalitas	66
Gambar 4.2 : Grafik Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian.....	91
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 3. Hasil Rekap Data Kuesioner Penelitian.....	96
Lampiran 4. Hasil Uji Intsrumen Penelitian.....	106
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	113
Lampiran 6. Hasil Hipotesis.....	115
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas disektor publik membuat manajemen sektor publik harus berupaya meningkatkan sistem akuntabilitasnya kearah yang lebih baik. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa Sektor publik adalah sebuah lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Mardiasmo (2009: 20) mengatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Harun (2009: 8) mengatakan bahwa konsep akuntabilitas dibagi menjadi dua, pertama adanya kapasitas bertindak dari pelaksana tugas dan, kedua adanya konteks atau ruang lingkup dimana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian baik pemberi tanggung jawab (tugas) maupun pelaksana tugas.

Jadi makna akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya terkait memberikan pelayanan baik pengadaan barang maupun jasa dalam memenuhi hak dan kebutuhan publik kepada pemberi amanah.

Dalam sektor publik akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, yang pada intinya akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban amanah kepada pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban amanah kepada publik.

Jadi lembaga sektor publik dapat dikatakan akuntabel ketika dapat menjalankan fungsinya secara maksimal yaitu memberikan pelayanan publik baik berupa pengadaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik serta melengkapi dengan adanya bukti pertanggungjawaban atas kinerja mereka.

Didalam Islam juga diterangkan tentang pentingnya akuntabilitas yaitu barang siapa yang telah mendapat amanah harus dapat mengemban amanah itu dengan baik dan adil seperti yang tertuang pada surat an-nisa ayat 58 yang bunyinya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)

Dalam meningkatkan sistem akuntabilitas maka harus diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, faktor tersebut salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Mardiasmo (2004: 37), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan

politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) serta dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya.

Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan dapat dijadikan alat pertanggungjawaban. Sehingga laporan keuangan sangat penting karena dapat mengukur sejauh mana kinerja sudah dilaksanakan dan menjadi alat bukti apakah kinerja sudah sesuai dengan kriteria akuntabel.

Faktor kedua adalah aksesibilitas laporan keuangan. Jones et al., dan Stecollini dalam Mustofa (2012) mengatakan ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Untuk itu pemerintah alangkah baiknya membuka ruang akses bagi publik dan tidak hanya kepada DPRD/Pemerintah pusat.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hak publik, maka dari itu lembaga sektor publik selaku pihak manajerial harus memberikan ruang yang memadai kepada konstituen/stakeholder baik dari internal maupun eksternal dalam mengakses laporan keuangan.

Mohammad dalam Wildani (2014) dengan menyediakan ruang yang memadai dalam mengakses laporan keuangan dapat mencegah timbulnya *asimetry*

information yang beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen yang berada diluar manajemen.

Scott dalam Darmawan (2014) menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menciptakan informasi yang terbuka seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *information asymetry* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

Darmawan (2014) menyatakan melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melalui aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

Faktor yang ke 3 adalah pengawasan fungsional. Agar penyelenggaraan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka diperlukan sebuah pengawasan. Berdasarkan metodenya pengawasan dapat dibagi menjadi 2, yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Intinya pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam batas2 lingkungan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kegiatan pengawasan akan lebih efektif ketika melibatkan pengawasan fungsional, hal itu disebabkan karena atasan mempunyai banyak bawahan dengan kegiatannya masing-masing

sehingga dalam proses pengawasan tidak dapat mengawasi secara detail berbeda halnya dengan pengawasan fungsional karena pengawasan fungsional hanya ditugaskan untuk mengawasi sesuai dengan lingkungannya.

Wulandari (2013) mengatakan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin bebas dari kepentingan perseorangan, korupsi, kolusi dan nepotisme maka kinerja pemerintah harus diawasi oleh lembaga yang independen, baik eksternal maupun internal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa suatu pengawasan akan lebih efektif apabila melibatkan pihak eksternal sebagai pendukung pihak yang ditunjuk sebagai pengawas internal.

Handayani (2014) mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi diharapkan dari pengawasan fungsional ini kegiatan pengawasan dapat lebih efektif sesuai rencana yang ditetapkan sehingga akuntabilitas dapat dicapai.

Faktor yang keempat adalah audit kinerja. Mardiasmo (2009: 121) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam

menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Hal tersebut didukung pernyataan Rai (2008: 47) yang mengatakan audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif. Dari audit kinerja dapat diketahui apakah kinerja sudah berorientasi pada nilai ekonomis, efisien dan efektif seperti kebutuhan publik.

Menurut Rai (2008) mengatakan berdasarkan UU No.15 tahun 2004 dan SPKN, audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Hal tersebut didukung Sherly dalam Rahayu (2011) bahwa audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya.

Sukoharjo adalah salah satu dari sekian banyaknya kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo sendiri merupakan daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah yang kaya karena mempunyai sumber

pendapatan yang banyak baik dari industri maupun wisata. Dalam Anggaran Kabupaten Sukoharjo memiliki anggaran yang jumlahnya tidak sedikit dan dari tahun 2010-2015 anggaran belanja pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Namun pada tahun 2012 terdapat fenomena dimana pembangunan sarana pasar Ir Soekarno yang mundur dari tenggat waktu yang ditentukan, hal ini sedikit banyak membuat kepercayaan atas keakuntabilisan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan. Terlebih di tahun 2014 pemerintah kabupaten Sukoharjo mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (<http://semarang.bpk.go.id/>).

Predikat wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan ketika: auditor merasa bahwa ruang lingkup dibatasi, auditor tidak dapat melakukan prosedur auditnya, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) atau prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan tidak konsisten namun laporan keuangan masih wajar.

Hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan walaupun tidak fatal. Hal tersebut apabila dibiarkan akan tercipta kecurigaan sehingga dalam setiap kinerja yang dijalankan pemerintah yang sedianya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah Sukoharjo.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Laksana dan Handayani (2014) yang meneliti pengaruh kejelasan anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di kabupaten Batang namun

semua variabel x secara parsial tidak berpengaruh pada variabel y dan berpengaruh positif signifikan secara simultan.

Dari penelitian tersebut ditemukan ketidaksesuaian khususnya pada variabel pengawasan fungsional dimana penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan juga penelitian Rahayu (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Badan dan Dinas yang Tergabung Dalam SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meningkatnya tuntutan publik agar lembaga sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitasnya, tidak hanya berupa informasi namun juga disertai sistem pertanggungjawaban yang tepat.
2. Ditemukannya *gap* penelitian yang dilakukan Laksana dan Handayani dengan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
3. Masih terdapat indikasi bahwa kinerja belum akuntabel.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada pengkajian: Pengujian pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik (kinerja pemerintah daerah) menggunakan empat variabel yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?
3. Apakah pengawasan fungsional memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?
4. Apakah audit kinerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?
5. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
2. Mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
3. Mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
4. Mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.
5. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan pelayanan dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti agar dapat mengetahui apakah keempat faktor tersebut, yakni penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja berpengaruh

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik baik secara parsial maupun simultan sehingga sebagai warga negara, peneliti dapat memberikan referensi lembaga sektor publik dalam meningkatkan pelayanannya dalam menunjang akuntabilitasnya kepada publik.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas Publik

1. Definisi Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009: 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran subyektif (Sadjiarto, 2000), antara lain:

- a. *Probity and legality accountability*, hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Process accountability*, dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.
- c. *Performance accountability*, pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
- d. *Program accountability*, di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
- e. *Policy accountability*, Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak.

2. Jenis dan Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Menurut Mardiasmo (2009: 21) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari dinas ke pemerintah daerah, pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Sedangkan dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009: 21) dibagi menjadi empat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Elwood bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik antara lain:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Landasan Akuntabilitas Menurut Islam

Dari sudut pandang islam terdapat perintah untuk mempertanggungjawabkan amanah yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu:

Q.S Al-Anfal :27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

حَدَّثَنَا عَقَابُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Rasulullah saw bersabda: tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya. (HR. Ahmad bin hambal)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فَلَانَ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Abu maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang disertai oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

1. Definisi Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2006: 247) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik laporan dapat menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang dipercayakan.

2. Standar Penyajian Laporan Keuangan

Standar penyajian laporan keuangan menurut Mustofa (2012) yaitu lengkap dan kualitatif. Untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban secara lengkap sudah diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 Pasal 31 yang dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi:

a. Laporan Realisasi APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PP No. 24 Tahun 2005).

b. Neraca.

Penyajian laporan keuangan berupa neraca sangat penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Mulyana, 2006).

c. Laporan Arus Kas.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, pengertian laporan arus kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode akuntansi.

d. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi

untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dijelaskan dalam lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan poin 32-37 yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Bastian (2006) menjelaskan secara rinci mengenai keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
- b. Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi
- c. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya
- d. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

3. Hubungan Variabel Penyajian Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik

Governmental Accounting Standard Board menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut: *...Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability is based*

on the belief that the citizenry has a "right now," a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society (Mardiasmo, 2009).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktifitas keuangan saja. *Concept Statement No.1* menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo, 2009: 163).

Hanley dalam Harun (2009) menyatakan laporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk adanya pelaksanaan tugas, laporan akuntabilitas dan alat evaluasi, alat perencanaan, petunjuk adanya kelanjutan organisasi dan alat publikasi. Jadi dengan adanya laporan keuangan dapat menjadi pedoman bagi internal manajemen terkait pelaksanaan tugas, mengevaluasi kinerja dan menjadi dasar bukti kinerja kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun publik.

Untuk dapat memuaskan kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Sistem akuntansi pemerintahan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAAP, Menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Kattelus dalam Rohman, 2009).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Mustofa, 2012).

2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

1. Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, dalam Rohman, 2009).

2. Standar Aksesibilitas Laporan Keuangan

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terkait dalam memberikan ruang akses atau aksesibilitas antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh stakeholder memiliki akses terhadap laporan keuangan.
- b. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.
- c. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan.

3. Hubungan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Publik

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga Karena laporan tersebut

tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., dan Stecollini dalam Mustofa, 2012).

Mohammad dalam Wildani (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *asymmetry information*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen.

Keberlangsungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *asymetry information* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik (Darmawan, 2014).

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013).

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu

pemerintah harus menyediakan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan baik dari media surat kabar, elektronik dan lain-lain yang biasa digunakan oleh masyarakat (Yani, 2009).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Mardiasmo (2002) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu masyarakat, legislatif, badan pengawasan, investor dan kreditor. Hal tersebut kurang lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang menyebutkan Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman dan pemerintah pusat.

2.1.4 Pengawasan Fungsional

1. Definisi Pengawasan

Menurut untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin bebas dari kepentingan perseorangan, korupsi, kolusi dan nepotisme maka kinerja

pemerintah harus diawasi oleh lembaga yang independen, baik eksternal maupun internal (Wulandari, 2013).

Pengawasan menurut Ulum (2009) adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengertian tersebut didukung Baswir (2000: 118) yang mengatakan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Tujuan dari pengawasan menurut Baswir (2000: 119) adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata terdapat hambatan ataupun penyimpangan harapannya dapat segera dikenali dan dilakukan tindakan koreksi agar pelaksanaan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Abdul (2000) yaitu:

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program

Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Mendeteksi adanya kecurangan Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Baswir (2000: 121) jenis pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain berdasarkan obyek, sifat, ruang lingkup dan berdasarkan metode pengawasannya berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pengawasan yang dijelaskan secara rinci:

a. Berdasarkan Obyek

Penerimaan negara dari (pajak dan bea cukai dan non pajak) dan pengeluaran.

b. Berdasarkan Sifat

- 1) Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan ini pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Detektif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Tujuan dari pengawasan ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Berdasarkan Lingkup

1) Internal yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintahan, misalnya inspektorat jenderal. Pengawasan intern dapat dilaksanakan secara sempit oleh institusi pengawasan intern yang telah ada, dan luas yang dapat dilakukan oleh institusi yang di-bentuk oleh pemerintah dari unsur luar pemerintah.

2) Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar pemerintah, misalnya BPK, DPR, dan masyarakat.

d. Berdasarkan Metode

1) Pengawasan melekat yaitu suatu bentuk pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat, atau dalam definisi lain pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan, dilakukan secara terus menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan efektif dan efisien.

2) Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk/ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan.

3. Definisi Pengawasan Fungsional

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”

Baswir (2000: 137) menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah. Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- c. Inspektorat Wilayah Propinsi.
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota.

Tanggungjawab koordinasi pelaksanaan pengawasan fungsional berada ditangan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Wakil Presiden dibantu oleh Menko Ekuin atau Wasbang dan kepala BPKP, bertugas untuk merumuskan

kebijaksanaan pengawasan fungsional yang telah dirumuskan tersebut, Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang antara lain oleh para menteri, panglima TNI, Jaksa Agung dan Para pejabat lain yang dianggap perlu.

Untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan adanya kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pemeriksaan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pelaksanaan pengawasan fungsional dan fungsi utama dari pemeriksaan oleh Bawasda adalah membantu pimpinan organisasi dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

4. Hubungan Variabel Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik

Didalam penelitian Rahayu (2011) menyatakan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wulandari (2013) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik dengan sampel penelitian pemerintahan kota Padang, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik.

Handayani (2014) berpendapat Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baswir (2000: 137) mengatakan bahwa jika pengawasan hanya dilakukan dari pihak internal saja atau metode pengawasan yang digunakan hanya melalui pengawasan melekat saja maka terbukanya kemungkinan kolusi antara pengawas dan pihak yang diawasi sangat besar. Maka dari itu pengawasan fungsional digunakan untuk menunjang agar pengawasan dapat berfungsi secara efektif.

2.1.5 Audit Kinerja

1. Definisi Audit

Menurut Malan dalam Mardiasmo (2009: 179) mengatakan bahwa audit dalam audit keuangan adalah “Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan criteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut”.

Sedangkan menurut Arnes dan Loebecke dalam Abdul halim (2004: 371) Auditing adalah “pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

2. Jenis-Jenis Audit Sektor Publik

Jenis-jenis audit dalam sektor publik menjadi tiga kategori. Menurut Halim (2004: 371) secara umum terdapat tiga macam audit didalam sektor publik yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit investigasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Audit Keuangan, yaitu audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.
- b. Audit Kinerja, yaitu audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.
- c. Audit Investigasi, yaitu kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditentukan.

Untuk menjamin dilakukanya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah maka diperlukan sistem pemeriksaan, tidak sekedar *conventional audit*, namun perlu juga dilakukan *value for money audit (VFM audit)*. Menurut mardiasmo dengan menggabungkan audit keuangan dengan audit kinerja (*VFM audit*) lebih

baik untuk menilai akuntabilitas publik suatu lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009:179).

3. Definisi Kinerja

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mangkunegara (2000: 67) mengemukakan pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya.

4. Definisi Audit Kinerja

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa audit kinerja adalah pemeriksaan terkait kinerja/pengelolaan keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan yang bertujuan apakah laporan tersebut sudah menggambarkan kejadian aslinya dan apakah pengelolaan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.

Menurut Rai (2008) mengatakan berdasarkan UU No.15 tahun 2004 dan SPKN, audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Perbedaan *VFM audit* dengan *conventional audit* adalah dalam hal laporan audit. Audit yang konvensional, hasil auditnya adalah berupa pendapat (opini)

auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan criteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetap juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan (Mardiasmo, 2009: 180).

5. Indikator Dalam Melakukan Audit Kinerja

Aspek atau indikator yang menjadi acuan dalam audit kinerja ada tiga macam. Macam-macam indikator tersebut adalah audit ekonomis, efisien dan efektif. Berikut adalah penjelasan terkait indikator yang digunakan dalam audit kinerja seperti yang dikutip mardiasmo (2002) sebagai berikut:

a. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Dari segi pengertian ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value. Pengertian Efisiensi adalah tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan :

- 1) Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.

- 2) Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola system informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

b. Audit Efektifitas

Menurut *Audit Commission* (1986), efektifitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target result). Audit efektifitas (audit program) bertujuan untuk menentukan :

- 1) Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
- 2) Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- 3) Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Efektifitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa (konsumen). Untuk mengukur efektifitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. jika hal ini belum tersedia, auditor harus bekerjasama dengan *top up management* dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.

6. Hubungan Variabel Audit Kinerja Dengan Akuntabilitas Publik

Darmawan (2014) menyatakan audit kinerja ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pertanggungjawaban.

Sumaryati dalam Darmawan (2014) menyatakan bahwa strategis audit kinerja sektor publik yaitu : Pertama, audit kinerja ditujukan dalam rangka penilaian, perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi. Kedua, audit kinerja dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiga, audit kinerja dilakukan guna mendorong terciptanya *clean government*, *good governance accountable government* baik pada pemerintah pusat dan daerah.

Mardiasmo (2009: 121) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut mardiasmo akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Dalam penelitian Rahayu (2011), dan Kristianto (2011) menemukan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Bastian (2007: 48) menyatakan bahwa apabila pelaksanaan audit kinerja dilakukan dengan baik, maka tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses

pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong adanya pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Rai (2008: 47) mengatakan audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	Hehanussa	2015	Variabel independen : Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Suratmi, Herawati dan Darmawan	2014	Variabel Independen : Audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Akuntabilitas publik	Regresi linier berganda	Audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik
3.	Laksana dan Handayani	2014	Variabel independen: Kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja Variabel dependen : Akuntabilitas publik	Regresi linier berganda	Kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik secara parsial, namun berpengaruh secara simultan.

Tabel Berlanjut

Lanjutan Tabel 2.1

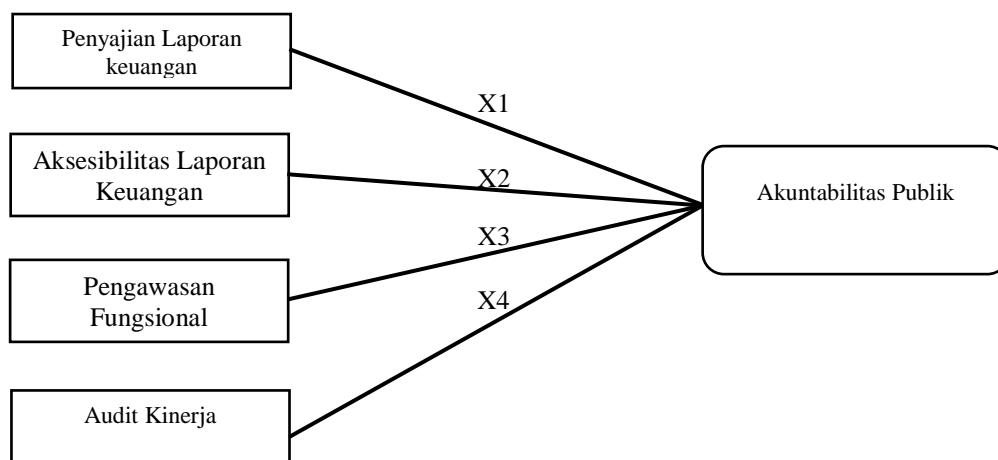
No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
4.	Wildani dan Widilestarin ingtyas	2014	Variabel independen: Audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Akuntabilitas publik	Regresi linier berganda	Audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik
5.	Wulandari	2013	Variabel independen : Pengawasan fungsional Variabel dependen : Akuntabilitas publik	Regresi linier sederhana	Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik
6.	Sande	2013	Variabel independen : Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan	Regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	Aliyah dan Nahar	2012	Variabel independen : Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan	Regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
8.	Mustofa	2012	Variabel independen : Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan Variabel dependen : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: Penelitian Yang Relevan

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Variabel dalam penelitian yang digunakan adalah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional, audit kinerja dan akuntabilitas publik. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dijabarkan, maka penulis telah menyusun sebuah kerangka penelitian yang disajikan pada:

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir



Ket:

X1: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik.

X2: Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik.

X3: Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik.

X4: Pengaruh Audit kinerja terhadap Akuntabilitas Publik.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Permatasari (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Namun dalam penelitian yang digunakan sebagai variabel independen adalah penyajian laporan keuangan karena pemerintah daerah menurut Undang-undang No.17 Tahun 2003 harus menyajikan laporan keuangan setidaknya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Harun (2009) menyatakan laporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk adanya pelaksanaan tugas, laporan akuntabilitas dan alat evaluasi, alat perencanaan, petunjuk adanya kelanjutan organisasi dan alat publikasi. Jadi dengan adanya laporan keuangan dapat menjadi pedoman bagi internal manajemen terkait pelaksanaan tugas, mengevaluasi kinerja dan menjadi dasar bukti kinerja kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun publik.

Iqbal (2009) mengatakan pengungkapan atas informasi dalam laporan keuangan merupakan elemen penting dari transparansi dan akuntabilitas fiskal. Selain itu, penelitian terkait juga dilakukan Sande (2013) dan Mustofa (2012) dan hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas publik.

Menurut Mustofa (2012) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Berdasarkan temuan tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ :Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

2.4.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

Kristianto (2011) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Iqbal (2009), Sukhemi (2012), Sande (2013), dan Mustofa (2012) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan

Sukhemi (2012) mengatakan ketidak-mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Iqbal (2009) yang berpendapat apalah artinya menyajikan neraca (laporan keuangan tetapi tidak memberikan kemudahan akses terhadap laporannya, maka usaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas tidak bisa berjalan maksimal.

Kristianto (2011) menyatakan bahwa dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *asymetry information* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah

dalam mengelola sumber daya publik. Berdasarkan temuan tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

2.4.3 Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik

Handayani (2014) berpendapat dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Wulandari (2009) menguji tentang pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Berdasarkan temuan tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

2.4.4 Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

Wildani (2014) mengatakan bahwa audit kinerja yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu menurut Wiarty (2010) menyatakan bahwa apabila Audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.

Rahayu (2011), dan Kristianto (2011) menemukan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Bastian (2007: 48) menyatakan bahwa apabila pelaksanaan audit kinerja dilakukan dengan baik, maka tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat.

Darmawan (2014) menyatakan bahwa strategis audit kinerja sektor publik yaitu: pertama, audit kinerja ditujukan dalam rangka penilaian, perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi. Kedua, audit kinerja dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiga, audit kinerja dilakukan guna mendorong terciptanya *clean government, good governance accountable government* baik pada pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan temuan tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan September 2014 sampai selesai. Penelitian ini dilakukan di 25 Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12).

3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh badan maupun dinas yang termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. yang berjumlah 25 dinas atau dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

1.	Dinas Pendidikan	Jl. Veteran Nomor 54 Sukoharjo	14	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Tentara Pelajar Sukoharjo
2.	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Jl. Veteran Nomor 9 Sukoharjo	15	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Kyai Mawardi Nomor 1 Sukoharjo
3.	Dinas Kesehatan	Jl. Dr. Muwardi Nomor 66 Sukoharjo	16	Badan Ketahanan Pangan	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 7 Sukoharjo
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 3 Sukoharjo	17	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
5.	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	18	Inspektorat	Gedung C. Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gedung KPT Lt. III Jl. Kyai Mawardi Nomor 1 Sukoharjo	19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 1 Sukoharjo
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Rajawali Nomor 9 Sukoharjo	20	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Jl. Slamet Riyadi Nomor 17 Sukoharjo
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo	21	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Gedung KPT Lt. I Jl. Kyai Mawardi Nomor 1 Sukoharjo
9.	Dinas Pertanian	Jl. Dr. Muwardi Nomor 14 Sukoharjo	22	Kantor Penanaman Modal	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 5A Sukoharjo
10.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jl. Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo	23	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 378 Sukoharjo
11.	Dinas Sosial	Jl. Veteran Nomor 61 Sukoharjo	24	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 5B Sukoharjo
12.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung KPT Lt. II Jl. Kyai Mawardi Nomor 1 Sukoharjo	25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Slamet Riyadi Nomor 52 Sukoharjo
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gedung C. Komplek Kantor Bupati Sukoharjo Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo			

Sumber: Peraturan Bupati Sukoharjo no.15 Tahun 2014 Tentang Alamat Kantor

3.3.2 Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Sampel penelitian ini adalah kepala dinas dan pegawai bagian keuangan dan administrasi pada setiap badan atau dinas yang termasuk dalam satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) Sukoharjo. Dengan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang (Kepala Dinas dan Kepala urusan bagian keuangan dan administrasi) setiap dinas atau jika dijumlah, namun karena terdapatnya 1 kuesioner yang tidak dapat diolah, maka total responden yang seharusnya adalah 2 orang x 25 dinas adalah 50 orang, menjadi 49 orang.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap paling mengerti mengenai sistem akuntabilitas publik terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

3.4. Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Menurut Soeratno dan Arsyad (2008: 67) mengemukakan data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer menurut supomo (2012: 147) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu kepala dinas dan kepala urusan bagian keuangan dan administrasi di masing-masing dinas yang tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek tanpa melalui perantara (Arikunto, 2006). Data ini diperoleh dari dinas-dinas yang tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Cara mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menggunakan angket (kuisisioner). Kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan ini bersifat terbuka, yaitu jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh peneliti atau secara langsung jawaban dari responden (Juliansyah, 2011: 139). Dalam penelitian ini memakai cara sebagai berikut :

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi lingkungan yang tersedia dilapangan penelitian. Metode observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Basrowi dan Suwandi, 2008: 94). Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan badan dan dinas yang tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah kabupaten sukoharjo terkait dalam menunjang akuntabilitas publiknya.

2. Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dimana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja (Darwanis, 2012).

Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian; pertama bagian umum mengenai identitas responden. Kedua, pernyataan mengenai pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik yang berupa pertanyaan tertutup sebanyak 23 pertanyaan.

3. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2006: 158) dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari dinas-dinas yang tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dan catatan-catatan akuntansi yang digunakan.

3.6 Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif), dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai dan dapat mengubah nilainya (Syofian, 2013: 10). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel terikat (dependen variabel) juga disebut variabel respons atau endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik.

2. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel bebas (independen variabel) disebut juga variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau *antecedent* adalah variabel yang menjadi sebab atau mengubah atau mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), pengawasan fungsional (X_3). Audit Kinerja (X_4).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel-variabel yang diteliti.

3.7.1 Variabel Dependen (Y)

Lembaga sektor publik adalah pihak yang diberi amanah sedangkan pemberi amanah adalah masyarakat, untuk memberikan kepercayaan bahwa kinerja lembaga sektor publik sudah sesuai berdasarkan kepentingan riil masyarakat (*good and clean governance*), sektor publik harus memberikan sistem akuntabilitas yang baik.

Sedangkan dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009: 21) dibagi menjadi empat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Elwood bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik yang dijadikan indikator untuk penelitian ini adalah

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Terkait apakah pelayanan sesuai atau tidak menyalahi aturan/hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaannya tidak melakukan penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas Proses

Terkait apakah prosedur dalam pelaksanaan tugas sudah memadai atau belum termasuk didalamnya sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Terkait apakah dalam mengadakan program sudah dapat menjamin tercapainya tujuan awal dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang lain.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait apakah dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (DPR/DPRD) dan masyarakat.

3.7.2 Variabel Independen (X)

Mulyana dalam Mustofa (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Alasan harus lengkap karena agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan semua pengguna (Rohman, 2009).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin bebas dari kepentingan perseorangan, korupsi, kolusi dan nepotisme maka kinerja

pemerintah harus diawasi oleh lembaga yang independen, baik eksternal maupun internal (Wulandari, 2013).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut mardiasmo akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009: 121). Definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel X

Variabel	Definisi	Indikator
Penyajian Laporan Keuangan	Mustofa (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Alasan harus lengkap karena agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan semua pengguna (Rohman, 2009).	1. Lengkap : Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Kualitatif: Relevan, Andal, Dapat dipahami, Dapat dibandingkan .
Aksesibilitas laporan keuangan	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly et al, dalam Rohman, 2009).	1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i>
Pengawasan fungsional	Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa: "Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian".	Pengawasan dilakukan dari perencanaan anggaran sampai realisasi anggaran.
Audit kinerja	Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa audit kinerja adalah pemeriksaan terkait kinerja/pengelolaan keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan yang bertujuan apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.	1. Keekonomisan kinerja 2. Keefisien kinerja 3. Keefektifitasan kinerja

Sumber: data diolah, 2016

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 1998: 121). Dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Dermawan, 2013: 169).

Skala *likert*, skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban. Untuk mengetahui pengaruh modal, kemampuan/skills, lingkungan yang kondusif dan lokasi terhadap keberhasilan usaha. Maka responden diberikan pertanyaan – pertanyaan yang sesuai dengan variabel. Setiap pertanyaan tersebut disertai dengan 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka seperti berikut :

1. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor : 5
2. Jawaban setuju (S) diberi skor : 4
3. Jawaban netral (N) diberi skor : 3
4. Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor : 2
5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor : 1

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, untuk itu keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.9 Teknik Analisis Data

Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 16.0 for windows. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Berikut penjelasannya:

3.9.1 Uji Instrumen Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 179) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Penggunaan tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Berikut adalah definisi alat ukur kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Alat pengukur yang yang absah akan mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya.

Pertanyaan dikatakan valid jika adanya korelasi signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan dukungan pertanyaan tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Untuk mengujinya menggunakan korelasi Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pengujian

signifikan dengan kriteria menggunakan r_{tabel} pada tingkat signifikan 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut adalah valid dan sebaliknya (Priyatno, 2014: 51).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006). Maksudnya alat ukur tersebut akan tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari pengukur (Priyatno, 2014: 64).

Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2011:hal. 120). Reliabilitas suatu variabel dilihat dari hasil statistik *Croanbach Alpha (a)*, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai croanbach alpha $> 0,06$ (Priyatno, 2014). Menurut Sekaran (1992), reabilitas $< 0,6$ adalah kurang baik, sedangkan $0,7$ dapat diterima dan diatas $0,8$ adalah baik.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi (*misspecification*) model regresi yang digunakan. Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (Latan dan Temalagi, 2013: 56).

Adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan karena data penelitian merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Berikut adalah pengertian dari uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak menurut Ghozali (2006) yaitu dengan analisis grafik maupun uji statistik. Penulis menggunakan grafik dengan melihat *normal probability plot*. Disamping uji grafik dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik salah satunya dengan uji statistik *non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

Apabila titik-titik telah mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan *residual* telah mengikuti distribusi normal. Residual disini adalah variabel yang ikut berpengaruh dalam analisis regresi tapi tidak ikut diteliti (Puji, 2013). Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Apabila nilai probabilitas

$> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2006), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bias ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen < 10 , berarti tidak ada Multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Metode pengujian yang digunakan untuk melihat adanya heteroskedastisitas dalam penelitian adalah metode scatter-plot dan glejser. Uji Scatter-plot bisa

dilakukan dengan melihat pola. Jika tidak ada pola jelas (titik-titik menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan glejser dapat dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel *independent* dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel *independent* dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

3.9.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi (Indriantoro dan Supomo, 2002: 191). Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda (*multiple linear regression method*) bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + e$$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas Publik
X ₁	= Penyajian Laporan Keuangan
X ₂	= Aksesibilitas Laporan Keuangan
X ₃	= Pengawasan Fungsional
X ₄	= Audit Kinerja
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_a diterima).

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

Menurut Gujarati dan Poter (2010) sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (*Ordinary Least Squares*/pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (*Best Linear Unbiased Estimates*) (Latan dan Temalagi, 2013: 80). Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinasi (R-squares), signifikansi uji F dan signifikansi uji t yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika

nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

2. Uji Ketepatan Model (UJI F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan ke model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* (Ghozali, 2006). Pengujian F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% atau (p -value $<$ 0,05), maka H_a diterima, yang artinya variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (Bambang, 2004: 21).

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji t probabilitas $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} >$ t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 570 BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 420 BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 320 LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 490 32.000 LS. Dengan luas 46,666 Km², atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi Sukoharjo terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur. Sesuai dengan letak geografis, Sukoharjo dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230C sampai dengan 340C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

4.1.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di 25 Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan Dinas di setiap Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Berikut adalah tabel proses pembagian kuesioner serta tingkat pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Kuesioner yang disebar	Kuesioner tidak kembali	Kuesioner Rusak	Jumlah kuesioner
50	1	0	49

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

$$\text{Response Rate} = 49/50 \times 100\% = 0,98$$

$$\text{Unusabel Response Rate} = 1/50 \times 100\% = 0,02$$

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang disebar kepada responden adalah sebanyak 50 namun hanya 49 yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil yang ada, respon pegawai terhadap penelitian ini sangat baik terlihat banyak kuesioner yang diisi oleh para responden.

Terbatasnya jumlah kuesioner dikarenakan pembagian kuesioner hanya dibagikan kepada responden yang memenuhi kriteria sampel saja. Dan juga mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga maka pada penelitian ini sampel diambil di 25 dinas sedangkan jumlah semua yang tergolong anggota SKPD ada 38. Jadi pada penelitian ini sudah menyertakan sekitar 65,9% dari keseluruhan anggota SKPD di Kabupaten Sukoharjo.

4.1.3 Profil Responden

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Analisis statistik deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui distribusi responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin. Distribusi 49 Pegawai pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo menurut jenis kelamin dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	26	53.06	53.06	53.06
Perempuan	23	46.93	46.93	100.0
Total	49	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan keterangan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui jenis kelamin dari 49 pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 53,06% atau 26 responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 46,93% atau 23 responden berjenis kelamin perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1.	D3	10	20,41%
2.	S1	18	36,73%
3.	S2	21	42,86%
4.	S3	0	0%

Sumber: data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden mempunyai tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 21 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan S2.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1.	<5	-	-
2.	5- 10 tahun	7	14,3%
3.	>10 tahun	42	85,7%

Sumber: data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa masa kerja diatas 10 tahun berjumlah paling banyak yaitu sebesar 42 orang atau sekitar 85,7%. Sementara,

responden yang bekerja dalam kurun waktu 5-10 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 14,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang menjadi sampel penelitian yaitu kepala dinas dan kepala bagian keuangan di 25 Badan dan Dinas yang tergabung dalam SKPD Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo mayoritas sudah memiliki pengalaman di bidangnya.

4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validitas instrumen angket. Pengujian validitas, butir soal menggunakan korelasi *product moment*. Tingkat validitas item diketahui dengan membandingkan harga r_{xy} dengan harga r_{tabel} . Apabila $r_{xy} > r_{tabel}$ maka item tersebut valid dan sebaliknya apabila $r_{xy} < r_{tabel}$ maka item angket dinyatakan tidak valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas item tiap variabel.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas
Akuntabilitas Publik

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	P	Status
Item 1	0,657	0,233	0,000	Valid
Item 2	0,862	0,233	0,000	Valid
Item 3	0,790	0,233	0,000	Valid
Item 4	0,791	0,233	0,000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.5 diatas, untuk variabel akuntabilitas publik diperoleh hasil bahwa 4 item pertanyaan dinyatakan valid,

karena nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan dalam variabel akuntabilitas publik layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil uji validitas untuk variabel penyajian laporan keuangan:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas
Penyajian Laporan Keuangan

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	P	Status
Item 1	0,785	0,233	0,000	Valid
Item 2	0,621	0,233	0,000	Valid
Item 3	0,695	0,233	0,000	Valid
Item 4	0,708	0,233	0,000	Valid
Item 5	0,719	0,233	0,000	Valid
Item 6	0,631	0,233	0,000	Valid
Item 7	0,657	0,233	0,000	Valid
Item 8	0,635	0,233	0,000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.6 di atas, untuk variabel penyajian laporan keuangan diperoleh hasil bahwa 8 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan dalam variabel penyajian laporan keuangan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil uji validitas untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	P	Status
Item 1	0,818	0,233	0,000	Valid
Item 2	0,851	0,233	0,000	Valid
Item 3	0,828	0,233	0,000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.7 diatas, untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh hasil bahwa 3 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan dalam variabel aksesibilitas laporan keuangan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil uji validitas untuk variabel pengawasan fungsional:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas
Pengawasan Fungsional

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	P	Status
Item 1	0,716	0,233	0,000	Valid
Item 2	0,833	0,233	0,000	Valid
Item 3	0,853	0,233	0,000	Valid
Item 4	0,635	0,233	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.8 diatas, untuk variabel pengawasan fungsional diperoleh hasil bahwa 4 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan dalam variabel pengawasan fungsional layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil uji validitas untuk variabel audit kinerja.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas
Audit Kinerja

No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	P	Status
Item 1	0,721	0,233	0,000	Valid
Item 2	0,538	0,233	0,000	Valid
Item 3	0,782	0,233	0,000	Valid
Item 4	0,672	0,233	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.9 diatas untuk variabel audit kinerja diperoleh hasil bahwa 4 item pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Dengan demikian item-item pertanyaan dalam variabel audit kinerja layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Hasil pengujian dari suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengujian menghasilkan *Cronbach's Alpha* (r_{alpha}) $> 0,60$ maka instrumen tersebut reliabel (Nunnally, 1969 dalam Ghozali, 2001: 140). Hasil uji reliabilitas dari masing-masing instrumen dalam variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

No	Nama Variabel	Alpha Cronbach	Normally	Status
1	Akuntabilitas Publik	0,778	$\geq 0,60$	Reliabel
2	Penyajian Laporan Keuangan	0,824	$\geq 0,60$	Reliabel
3	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,769	$\geq 0,60$	Reliabel
4	Pengawasan Fungsional	0,743	$\geq 0,60$	Reliabel
5	Audit Kinerja	0,612	$\geq 0,60$	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel-variabel seperti penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), pengawasan fungsional (X_3), dan audit kinerja (Y) adalah reliabel karena mempunyai nilai *cronbach alpha* > 0.60 sehingga dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

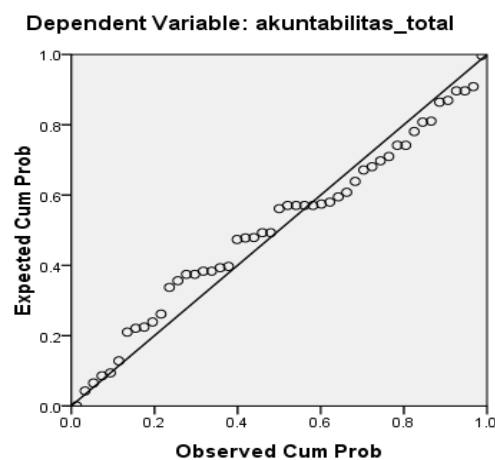
1. Normalitas

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak menurut Ghozali (2006) yaitu dengan analisis grafik maupun uji statistik. Jika menggunakan grafik dapat dengan melihat *normal probability plot*. Disamping uji grafik dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik salah satunya dengan uji statistik *non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

a. Uji P-Plot

Grafik 4.1
Hasil Pengujian P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data yang diolah, 2016

Dari grafik Normal P-P Plot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik mengikuti garis lurus atau berada tidak jauh dari garis diagonal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa residual yang digunakan dalam penelitian ini telah mengikuti distribusi normal (distribusi data normal).

b. Non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.11
Hasil Pengujian *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.05072706
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.066
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.743
Asymp. Sig. (2-tailed)		.639
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,639, berarti nilai signifikansi dapat diketahui lebih besar dari 0,05 maka dari itu distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan pengujian apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi maka terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel. Menguji adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat pada *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi bebas multikolinearitas adalah mempunyai VIF disekitar angka 1, sedangkan batas VIF adalah 10 dan

mempunyai angka tolerance mendekati 1. Hasil pengujian multikolinearitas dengan SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan	0,369	2,711	Tidak terjadi multikolinearitas
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,382	2,844	Tidak terjadi multikolinearitas
3.	Pengawasan Fungsional	0,550	1,818	Tidak terjadi multikolinearitas
4.	Audit Kinerja	0,608	1,645	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah, 2016

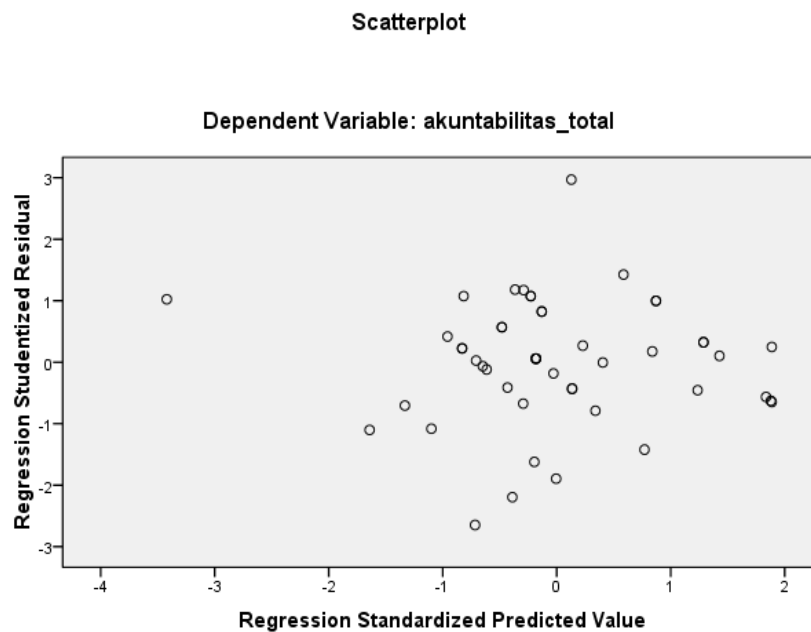
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, diketahui bahwa tidak ada satupun variabel yang mempunyai nilai Tolerance $\leq 0,1$ maupun nilai VIF ≥ 10 . Hal ini berarti variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi.

3. Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot dimana penyebaran titik-titik berbentuk acak, tidak memebentuk pola tertentu serta arah penyebarannya diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga layak dipakai.

a. Uji Scatterplot

Grafik 4.2
Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Sumber : Data Primer diolah, 2016

Dari grafik 4.2, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

b. Uji Glejser

Tabel 4.13
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.532	1.266		
pny_lap_keu_total	-.089	.098	-.217	-.915	.365
akses_total	.037	.089	.076	414	.681
pengawasan_total	.113	.077	.281	1.471	.148
audit_kinerja_total	-.019	.067	-.079	-.290	.773

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan (X1) sebesar 0,773 lebih besar dari 0,05, nilai signifikansi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) 0,681 lebih besar dari 0,05, nilai signifikansi variabel pengawasan fungsional 0,148 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi variabel audit kinerja 0,365 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel

4.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Ketepatan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja mempengaruhi secara simultan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas publik, H_0 diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dan H_0 ditolak apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$.

Tabel 4.14
Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	172.558	4	43.139	35.818	.000 ^a
Residual	52.993	44	1.204		
Total	225.551	48			

a. Predictors: (Constant), audit_kinerja_total, pengawasan_total, pny_lap_keu_total, akses_total

b. Dependent Variable: akuntabilitas_total

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ yaitu $35,818 \geq 2,81$ dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, artinya secara simultan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

2. Koefisien Determinasi (*R square*)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas (Ghozali, 2006).

Tabel 4.15
Hasil Uji *R-Square*

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.875 ^a	.765	.744	1.097	.765	35.818	4	44	.000

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Dari tabel 4.15 hasil analisis data pada *Model Summary* menunjukkan bahwa nilai *R Square* adalah 0,744. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas publik adalah sebesar 74,4%, sedangkan 25,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

3. Hasil Uji Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara parsial variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas publik, H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

Tabel 4.16
Uji t

No	Variabel	t_{hitung}	P	Kesimpulan
1	Penyajian Laporan Keuangan	6,277	0,000	H_1 diterima
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan	2,196	0,033	H_2 diterima
3	Pengawasan Fungsional	5,172	0,000	H_3 diterima
4	Audit Kinerja	2,379	0,022	H_4 diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2016

a. Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengolahan data untuk variabel kompetensi staf akuntansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,277. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,277 > 2,016$) dengan probabilitas $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengolahan data untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,196. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($2,196 > 2,016$) dengan probabilitas $0,033 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik.

c. Pengawasan Fungsional

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengolahan data untuk variabel struktur pengawasan fungsional diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,172. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,172 > 2,016$) dengan probabilitas $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel struktur pengawasan fungsional berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik.

d. Audit Kinerja

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengolahan data untuk variabel peran auditor internal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,379. Oleh karena itu nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,379 > 2,016$) dengan probabilitas $0,022 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang

berarti variabel peran audit kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik.

4. Koefisien Regresi Berganda

Koefisien regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja dengan variabel terikat yaitu akuntabilitas publik. Berikut adalah hasil perhitungannya.

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.087	1.877		-.046	.963
	pny_lap_keu_total	.519	.083	.755	6.277	.000
	akses_total	.347	.158	.271	2.196	.033
	pengawasan_total	-.572	.111	-.510	-5.172	.000
	audit_kinerja_total	.267	.112	.223	2.379	.022

a. Dependent Variable:
akuntabilitas_total

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Koefisien Regresi Linear

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

$$Y = 0,087 + 0,519X_1 + 0,347X_2 + 0,572X_3 + 0,267X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas Publik
X1	= Penyajian Laporan Keuangan
X2	= Aksesibilitas Laporan Keuangan
X3	= Pengawasan Fungsional
X4	= Audit Kinerja
a	= Konstanta
b1, b2, b3	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 0,087 mengindikasikan bahwa jika variabel independen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja adalah nol maka akuntabilitas publik nilainya 0,087.
- b. Nilai koefisien regresi variabel X_1 yaitu penyajian laporan keuangan (b_1) bernilai positif yaitu 0,519 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar 1 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,519 % dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel X_2 yaitu aksesibilitas laporan keuangan (b_2) bernilai positif yaitu 0,347 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,347 % dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel X_3 yaitu pengawasan fungsional (b_3) bernilai positif yaitu 0,572 ini dapat diartikan bahwa setiap pengawasan fungsional

sebesar 1 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,572 % dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

- e. Nilai koefisien regresi variabel X_4 yaitu audit kinerja (b_4) bernilai positif yaitu 0,267 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan audit kinerja sebesar 1 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,267 % dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis dugaan yang telah dibuat, dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk masing- masing variabel independen. Berikut pembuktiannya:

1. H_1 : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian variabel penyajian laporan keuangan (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 6,277 dan p -value sebesar 0,000. Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu $6,277 > 2,016$, dan p -value dibandingkan dengan α , yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan p -value lebih kecil dari α maka H_1 diterima. Jadi, ada pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa ketika penyajian laporan keuangan sudah sesuai dari segi kelengkapan dan kualitas, maka penyajian laporan keuangan dapat menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja sehingga kinerja yang direncanakan dapat tercapai sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban amanah

kepada publik. Hal tersebut diperkuat dengan pemerolehan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2015.

Kinerja publik dapat dikatakan akuntabel ketika kinerjanya sesuai hukum dan memberikan tingkat kejujuran yang memadai. Jadi dengan pemerolehan opini wajar tanpa pengecualian, menggambarkan bahwa laporan keuangan SKPD Sukoharjo tahun 2015 sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu lengkap dan berkualitas dan juga bebas dari materialitas atau informasi yang menyesatkan.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Hehanussa (2015), Herawaty (2014), Sande (2013), Nurhayani (2013), Nahar (2012) dan Mustofa (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

Dalam penelitian yang dilakukan Mulyana dalam Mustofa (2012) disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

2. H₂: Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian variabel aksesibilitas laporan keuangan (X₂) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,196 dan *p-value* sebesar 0,033. Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu $2,196 > 2,016$, dan *p-value* dibandingkan dengan *alpha*, yaitu $0,033 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan *p-value* lebih kecil dari α maka H₂ diterima. Jadi, ada

pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

Hasil tersebut menggambarkan jika dengan penyediaan ruang akses yang memadai akan menghindari terjadinya kesalah-pahaman antara pengguna satu dan pengguna lainnya. Jadi kinerja sudah dapat diakui keterbukaannya tanpa kecurigaan akan penyembunyian informasi dimana pihak manajerial lebih tahu dari pada pihak pemakai laporan dari luar (konstituen) diperkuat. Hal tersebut diperkuat dengan penyediaan ruang akses yang disediakan SKPD yang sudah peneliti verifikasi yakni dari surat kabar dan internet. Hasil tersebut juga diperkuat dengan tidak adanya respon atau keluhan dari kalangan internal dan eksternal SKPD dalam mengakses laporan keuangan.

Mardiasmo (2009) salah satu indikator akuntabilitas publik adalah Kebijakan terkait apakah dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (DPR/DPRD) dan masyarakat. Dan penyediaan ruang akses yang memadai adalah bukti bahwa kinerja dapat dipertanggung-jawabkan baik vertikal maupun horisontal.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Hehanussa (2015), Herawaty (2014), Sande (2013), Nurhayani (2013), Nahar (2012) dan Mustofa (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

Widilestariningtyas (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *asymmetry information*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen

yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen.”

Darmawan (2014) menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menciptakan informasi yang terbuka seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *asymetry information* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

Darmawan (2014) menyatakan melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melalui aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

3. H₃: Pengawasan Fungsional Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian variabel penyajian laporan keuangan (X₃) diperoleh nilai t hitung sebesar 5,172 dan *p-value* sebesar 0,000. Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu $5,172 > 2,016$, dan *p-value* dibandingkan dengan *alpha*, yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan *p-value* lebih kecil dari α maka H₃ diterima. Jadi, ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan melibatkan pengawas fungsional akan membantu kegiatan pengawasan menjadi lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan ketika hanya mengandalkan pengawasan dari pusat maka pengawasan tidak dapat

dilakukan secara menyeluruh mengingat hal yang perlu diawasi pusat tidak hanya satu kegiatan. Dan untuk menghindari adanya konspirasi antar pegawai pemerintah maka diperlukan pengawas yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan.

Hal tersebut dibuktikan dengan semakin efektifnya program dari SKPD Sukoharjo. Seperti pada kasus renovasi pasar Ir. Soekarno yang tidak kunjung selesai, dengan kerjasama yang dilakukan masyarakat dan pengawas internal selaku pengawas yang mengawasi fungsi dari sebuah aktivitas atau proyek memberikan teguran karena tidak sesuai dengan rencana dan sampai pada akhirnya akhirnya proyek tersebut dapat selesai.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa salah satu indikator kinerja sudah memenuhi akuntabilitas publik adalah proses kinerja dapat dipertanggungjawabkan yaitu terkait apakah dalam mengadakan program sudah dapat menjamin tercapainya tujuan awal dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang lain. Dan berkat adanya partisipasi dari pengawasan fungsional sebagai pendukung pengawasan melekat akhirnya program dapat berhasil sesuai rencana.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Laksana dan Handayani dimana pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hal itu disebabkan karena pada penelitian ini tidak hanya mengambil sampel pada lingkup inspektorat saja namun juga badan dan dinas yang tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah kabupaten Sukoharjo. Alasan peneliti melibatkan badan dan dinas dikarenakan badan dan dinas mengetahui berdasarkan realita lapangan apakah pengawasan fungsional benar-benar mempengaruhi akuntabilitas publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan pengawasan fungsional, maka akan semakin tinggi akuntabilitas publik dan sebaliknya.

Penelitian Rahayu (2011) menyatakan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

Handayani (2014) berpendapat Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baswir (2000: 137) mengatakan bahwa jika pengawasan hanya dilakukan dari pihak internal saja atau metode pengawasan yang digunakan hanya melalui pengawasan melekat saja maka terbukanya kemungkinan kolusi antara pengawas dan pihak yang diawasi sangat besar. Maka dari itu pengawasan fungsional digunakan untuk menunjang agar pengawasan dapat berfungsi secara efektif.

4. H₄: Audit Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian variabel audit kinerja (X₄) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,379 dan *p-value* sebesar 0,022. Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu 2,379 > 2,016, dan *p-value* dibandingkan dengan *alpha*, yaitu 0,022 < 0,05.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan p -value lebih kecil dari α maka H_4 diterima. Jadi, ada pengaruh yang signifikan antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.

Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan melakukan audit kinerja dapat diketahui apakah kinerja yang sudah dilaksanakan sudah memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektif, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan menghindari adanya *mark-up* anggaran dimana anggaran yang digunakan nilainya melebihi dari batas kewajaran. dari pemegang jabatan yang tidak bertanggungjawab.

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak adanya inefektif, inefisiensi dan inekonomis dalam aktivitas yang dijalankan dengan penguat pemerolehan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa kinerja dapat dikatakan akuntabel jika prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu terkait apakah prosedur dalam pelaksanaan tugas sudah memadai.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawan (2014) dan Widilestariningtyas (2014) yang membuktikan audit kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rai (2008), bahwa audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Darmawan (2014) menyatakan bahwa strategis audit kinerja sektor publik yaitu: pertama, audit kinerja ditujukan dalam rangka penilaian, perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi. Kedua, audit kinerja dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiga, audit kinerja dilakukan guna mendorong terciptanya *clean government, good governance accountable government* baik pada pemerintah pusat dan daerah.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Dalam penelitian Rahayu (2011), dan Kristianto (2011) menyatakan bahwa apabila pelaksanaan audit kinerja dilakukan dengan baik, maka tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong adanya pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Rai (2008) mengatakan audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur variabel dinyatakan valid dan reliabel. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian ketepatan model menunjukkan bahwa model regresi berganda tepat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas publik.
2. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Nilai koefisien regresi variabel X_1 yaitu penyajian laporan keuangan (b_1) bernilai positif yaitu 0,519, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,519% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Nilai koefisien regresi variabel X_2 yaitu aksesibilitas laporan keuangan (b_2) bernilai positif yaitu 0,347, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,347% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Nilai koefisien regresi variabel X_3 yaitu pengawasan fungsional (b_3) bernilai positif yaitu 0,572,

ini dapat diartikan bahwa setiap pengawasan fungsional sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,572% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

5. Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Nilai koefisien regresi variabel X_4 yaitu audit kinerja (b_4) bernilai positif yaitu 0,267 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan audit kinerja sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik sebesar 0,267% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
6. Hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 0,744 yang berarti bahwa 74,4 % akuntabilitas publik dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja. Sedangkan 25,6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga, dalam penelitian ini hanya mengambil sampel di 25 badan dan dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, sehingga hasil penelitian belum mewakili seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo
2. Penelitian belum dilengkapi dengan metode wawancara.

5.3. Saran-saran

1. Saran untuk SKPD Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

- a. Sebaiknya dalam menyajikan laporan keuangan, syarat kualitatif dalam menyajikan laporan keuangan harus selalu terpenuhi, yakni andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta dalam menyajikan laporan keuangan harus lengkap sesuai standar yang berlaku agar laporan keuangan dapat digunakan oleh *stakeholder* baik dari dalam maupun luar lingkungan manajerial atau pemerintah untuk kebutuhan masing-masing pengguna.
- b. Sebaiknya dalam merencanakan program dilakukan pengawasan agar program terarah sesuai dengan yang diharapkan. Dan akan lebih baik apabila turut menghadirkan pengawas fungsional baik dari internal maupun dari masyarakat sebagai pembantu pelaksanaan pengawasan dari pemerintah pusat.
- c. Sebaiknya penyediaan ruang akses laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi terutama di *website* atau internet dikarenakan perkembangan teknologi semakin maju dan intrnet merupakan salah satu sarana yang mungkin diakses publik. Hal tersebut dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman atau asimetri informasi antara pemerintah selaku pihak manajerial dengan publik selaku konstituen.
- d. Sebaiknya kinerja selalu diaudit berdasarkan metode *value for money*, agar kinerja tidak melanggar nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

- a. Melengkapi metode *survey* dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
- b. Memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya
- c. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas publik sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2009). *Metodologi penelitian kuantitatif: Bahan Ajar*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Baswir, R. (2005). *Akuntansi pemerintahan indonesia*. Jogjakarta : BPFE.
- Mahsun, M, Firma. S, dan Heribertus. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2006). *Statistik non-parametrik, teori dan aplikasi dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasan, I. (2009). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- [Http://semarang.bpk.go.id/](http://semarang.bpk.go.id/). Diakses tanggal 3 Agustus (2015) pada pukul 09.20 WIB.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif (edisi kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro, N dan Supomo, B. (2002). *Metodologi penelitian bisnis: untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. BPFE-Yogyakarta.
- Primayani, P.R., Herawaty, N.T., dan Darmawan, N.A.S. (2014). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintahan kabupaten bandung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.
- Laksana, A.P dan Handayani, B.D. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di kabupaten batang. *Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*. Universitas Negeri Semarang(2014).
- Latan, H dan Temalagi S. (2013). *Analisis multivariate teknik dan aplikasi program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*, edisi 4, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mohammad, N. (2005). *Metode penelitian*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad. (2008). *Metodologi penelitian ekonomi islam* Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mulyana, B. (2006). Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2.pp. 65-78*.
- Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pemalang. *Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*. Universitas Negeri Semarang.
- Nahar, A dan Aliyah, S. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189*. STIENU Jepara.
- Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayani, H. (2013). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (survey pada seluruh dinas pemerintahan kota bandung). Universitas Komputer Indonesia.
- Priyatno, D. (2009). *SPSS untuk analisis korelasi regresi dan multivariate*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, C. (2011). Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Skripsi. Unikom Bandung.
- Rai, I.G.A. (2008). *Audit kinerja sektor publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah provinsi sumatra barat). Artikel Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sardjiarto, A. (2000). *Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No. 2, November 2000: 138 – 150.
- Santoso, G. (2005). *Fundamental: penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Prestasi pustaka publisher.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran. (2006). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeratno dan Lincoln A. (2008). *Metodologi penelitian: untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Upp STIM YKPN.

- Sofiyan. (2013). *Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Subagyo, P. (2005). *Statistika induktif*. Yogyakarta.
- Suharsini, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi Dan bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Supriyanto. (2009). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: PT indeks.
- Suratmi, N.M., Herawaty, N.T., dan Darmawan, N.A.S. (2014). Pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014)*.
- Tika, P. (2006). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, I. (2009). *Audit sektor publik suatu pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widilestariningtyas, O., dan Wildani, O. (2014). Pengaruh audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan. Universitas Komputer Indonesia.
- Wulandari, I. (2013). Pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota padang. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.